

EVALUASI KEBIJAKAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI DI KECAMATAN KADUNGORA KABUPATEN GARUT

Puji Lestari^{1*}, Gunawan Undang², Heri³, Tom Finaldin⁴

¹Mahasiswi Universitas Al-Ghifari Bandung

²Dosen Universitas Al-Ghifari Bandung

³Dosen Universitas Al-Ghifari Bandung

⁴Dosen Universitas Al-Ghifari Bandung

*Korespondensi: ujay28lestarii@gmail.com

(Diterima oleh Dewan Redaksi: xx-xx-xxxx)
(Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: xx-xx-xxxx)

ABSTRAK

Penyaluran bantuan sosial non tunai di Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut salah satunya yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih menghadapi kendala seperti kurangnya transparansi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), lemahnya sinkronisasi data antar lembaga, dan ketidaksesuaian data penerima dengan kondisi nyata di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan penyaluran BPNT belum optimal; indikator efektivitas, efisiensi, dan responsivitas, namun kecukupan, pemerataan, dan ketepatan sasaran belum memadai. Masih terdapat masyarakat miskin, khususnya lansia, yang belum menerima bantuan, sementara sebagian penerima dianggap tidak layak. KPM juga menilai bantuan sembako lebih sesuai dibanding bantuan tunai. Faktor penghambat utama adalah ketidakakuratan data DTKS dan lemahnya koordinasi antar pelaksana. Solusi yang diusulkan meliputi pembaruan data secara berkala untuk meminimalkan ketidaktepatan sasaran, peningkatan sosialisasi agar KPM memahami hak dan kewajiban, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna memperlancar distribusi bantuan. Penelitian ini menegaskan pentingnya perbaikan sistem pendataan dan koordinasi untuk meningkatkan pemerataan dan ketepatan sasaran. Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan kerangka evaluasi kebijakan secara komprehensif di tingkat lokal, sehingga mengungkap kesenjangan antara kebijakan BPNT dan realitas implementasi di lapangan.

Keywords: Bantuan Pangan Non Tunai; Evaluasi Kebijakan; Keluarga Penerima Manfaat.

Puji Lestari, 2025. Evaluasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai di Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut.

A. PENDAHULUAN

Pendahuluan yang Kemiskinan masih menjadi persoalan utama di Indonesia, termasuk di Kabupaten Garut, yang berimplikasi pada rendahnya akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah

meluncurkan berbagai program bantuan sosial, salah satunya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dan memperkuat ketahanan pangan. Meski demikian, pelaksanaan BPNT di lapangan tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program

ini relatif baik dalam hal transparansi dan akuntabilitas, tetapi masih menghadapi kendala pada aspek kecukupan manfaat, ketepatan sasaran, serta keterbatasan sosialisasi kepada penerima. Kondisi tersebut menandakan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan praktik implementasi, terutama ketika diterapkan pada wilayah dengan karakter sosial-ekonomi yang khas.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan evaluasi menyeluruh mengenai implementasi BPNT di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Tujuan penelitian diarahkan untuk: (1) menilai efektivitas pelaksanaan BPNT sesuai dengan kerangka kebijakan yang berlaku, (2) mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penyalurannya, serta (3) merumuskan strategi yang dapat dilakukan guna mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa pengayaan literatur evaluasi kebijakan sosial sekaligus rekomendasi praktis bagi pemerintah dalam memperbaiki mekanisme penyaluran BPNT. Kebaruan studi ini terletak pada fokus penelitian yang lebih spesifik di Kecamatan Kadungora serta pendekatan evaluatif yang komprehensif dengan menyoroti aspek teknis, sosial, dan persepsi penerima manfaat.

B. KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial merupakan bagian integral dari kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang dan Gunawan (2023b), kebijakan sosial berfungsi sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas hidup dan memberikan perlindungan sosial melalui berbagai program pemerintah. Dalam konteks global, Amerika Serikat menitikberatkan kebijakan sosial pada layanan kesehatan, sedangkan penelitian menunjukkan bahwa semakin merata distribusi risiko sosial seperti pengangguran, semakin baik pula pemerataan kesejahteraan (Rehm, 2011; Bauml et al., 2019).

Di Indonesia, kebijakan sosial sering kali

dijalankan melalui mekanisme desentralisasi, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Tujuannya tidak hanya mengatasi persoalan sosial, tetapi juga mendorong pencapaian pembangunan nasional melalui peningkatan harkat dan martabat masyarakat (Thahir & Baharuddin, 2019; Undang & Gunawan, 2022b). Dengan demikian, kebijakan sosial dapat dipahami sebagai intervensi negara untuk menjamin kesejahteraan sekaligus pemerataan pembangunan.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah tahapan penting dalam siklus kebijakan yang berfungsi untuk menilai capaian serta kelemahan suatu program. Lester dan Stewart dalam Winarno (2014) menekankan bahwa evaluasi memiliki dua fungsi utama, yakni menggambarkan konsekuensi yang ditimbulkan kebijakan dan menilai tingkat keberhasilan atau kegagalannya. Sementara itu, Winarno (2008) menggarisbawahi bahwa evaluasi meliputi substansi, proses implementasi, hingga dampak kebijakan.

Dunn (2003) memandang evaluasi sebagai penyedia informasi terkait nilai manfaat dari hasil kebijakan, yang kemudian menjadi dasar bagi pembuat keputusan dalam melanjutkan, memperbaiki, atau menghentikan program (Widoyoko, 2010). Nugroho dalam Anggraeni & Zauhar (2013) mengelompokkan evaluasi ke dalam tiga bentuk, yaitu administratif, yudisial, dan politik. Lebih jauh, Dunn dalam Sudiro (2018) menyebutkan enam kriteria utama yang kerap digunakan dalam evaluasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, serta ketepatan. Keenam kriteria tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan kebijakan tercapai, sumber daya dimanfaatkan secara optimal, kebutuhan masyarakat terpenuhi, manfaat terdistribusi secara adil, aspirasi masyarakat terakomodasi, dan tujuan kebijakan relevan dengan masalah sosial yang dihadapi.

Bantuan Pangan Non Tunai

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu bentuk kebijakan sosial pemerintah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga miskin. Melalui program ini, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) memperoleh bantuan sebesar Rp200.000 per bulan yang dapat diakses dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di e-warong yang ditunjuk pemerintah (Kementerian Sosial,

2019).

BPNT bertujuan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, menyediakan asupan gizi yang lebih seimbang, memastikan ketepatan sasaran dan waktu penyaluran, memberikan keleluasaan bagi KPM dalam menentukan pilihan pangan, serta mendukung pencapaian SDGs (Perpres No. 63 Tahun 2017). Manfaat program ini tidak hanya terbatas pada peningkatan ketahanan pangan keluarga miskin, tetapi juga pada efisiensi penyaluran bantuan, penguatan perlindungan sosial, serta pengentasan kemiskinan (UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012).

Secara yuridis, BPNT didasarkan pada sejumlah regulasi, antara lain UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta diatur lebih lanjut melalui Perpres No. 82 Tahun 2016, Perpres No. 63 Tahun 2017, dan Permensos No. 20 Tahun 2019. Proses penyaluran dilakukan mulai dari penetapan penerima berdasarkan DTKS, penerbitan KKS oleh bank penyalur, hingga pencairan bantuan yang digunakan di e-warung.

Relevansi Evaluasi Kebijakan dengan Program BPNT

Evaluasi atas program BPNT menjadi hal yang krusial untuk memastikan tercapainya tujuan program secara efektif, efisien, dan adil. Dengan menggunakan kriteria evaluasi Dunn (2003), efektivitas dapat diukur dari sejauh mana BPNT menekan beban pengeluaran rumah tangga miskin, efisiensi ditinjau dari biaya penyaluran, perataan terkait distribusi bantuan di berbagai wilayah, responsivitas dari kepuasan dan penerimaan masyarakat, serta ketepatan dari relevansi program dengan kondisi kemiskinan. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfungsi menilai keberhasilan program, tetapi juga memberikan masukan perbaikan agar pelaksanaan BPNT semakin tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dengan pendekatan kualitatif peneliti langsung bisa masuk ke obyek, melakukan penjelajahan dengan *grand tour question*, sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan

jelas. Melalui penelitian kualitatif, peneliti akan melakukan eksplorasi terhadap suatu obyek (Subagyo & Kristian, 2023). Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2013:4), metode kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari individu serta perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan Sugiyono (2017:15), penelitian kualitatif bertujuan menggali, menemukan, dan menjelaskan fenomena sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Dengan demikian, metode ini dipilih untuk mendeskripsikan proses implementasi dan evaluasi kebijakan Program BPNT di Kecamatan Kadungora.

Penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Observasi dilakukan untuk menelaah perilaku dan interaksi sosial dalam pelaksanaan Program BPNT di Kecamatan Kadungora. Wawancara semi-terstruktur digunakan guna memperoleh informasi mendalam dari pemerintah daerah, TKSK, Dinas Sosial, Bank Mandiri, dan KPM. Dokumentasi memberikan data sekunder berupa arsip dan laporan resmi yang relevan, sedangkan studi kepustakaan dilakukan untuk meninjau literatur, regulasi, serta penelitian terdahulu sebagai penguat kerangka teori dan identifikasi celah penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai di Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut

- Efektif

Penyaluran BPNT dalam bentuk tunai dinilai lebih efektif dibandingkan sistem sebelumnya. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa bantuan tunai memberi fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti beras, telur, minyak, maupun kebutuhan sekolah. Namun demikian, sebagian penerima juga menggunakan bantuan untuk keperluan lain di luar pangan, sehingga manfaat program tidak sepenuhnya tercapai. Dari sisi pemerintah dan pendamping, penyaluran tunai dianggap lebih aman karena mengurangi potensi kecurangan di e-warung, tetapi pengawasan penggunaan bantuan menjadi lebih sulit. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas BPNT sangat bergantung pada kesadaran KPM dalam

memanfaatkan bantuan sesuai tujuan program.

- Efisiensi

Dari aspek efisiensi, sistem penyaluran melalui rekening bank dan pencairan lewat ATM dinilai lebih praktis, cepat, dan hemat waktu dibandingkan mekanisme sebelumnya melalui e-warung. KPM tidak lagi harus menunggu jadwal distribusi atau menghadapi masalah keterlambatan barang, karena dana dapat dicairkan kapan saja. Pihak Bank Mandiri, Dinas Sosial, TKSK, maupun aparat kecamatan sepakat bahwa sistem tunai lebih efisien, mengurangi antrean, serta meminimalisasi kendala distribusi. Meski demikian, keterbatasan akses dokumentasi teknis pencairan di lapangan menjadi tantangan bagi penelitian ini.

- Kecukupan

Bantuan BPNT sebesar Rp200.000 per bulan dinilai belum mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terutama bagi keluarga dengan banyak tanggungan. Sebagian besar KPM menyebut bantuan tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan selama 1-2 minggu. Meskipun demikian, mereka tetap merasa terbantu karena sifatnya sebagai tambahan untuk meringankan beban ekonomi. Pihak TKSK, Kecamatan, Dinas Sosial, dan Bank Mandiri juga menegaskan bahwa BPNT memang bukan ditujukan untuk menutup seluruh kebutuhan, melainkan hanya sebagai stimulus tambahan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Abdul Aziz & Wahyudi (2023) yang menyebutkan bahwa nominal bantuan relatif kecil dan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

- Pemerataan

Dari aspek pemerataan, penyaluran BPNT di Kecamatan Kadungora belum sepenuhnya merata. Sebagian KPM menilai bantuan sudah tepat sasaran, namun masih banyak warga kurang mampu, khususnya lansia, yang belum terdata sebagai penerima. Sebaliknya, ditemukan pula penerima bantuan dari kalangan yang

relatif lebih mampu. Pihak Dinas Sosial, Kecamatan, dan TKSK mengakui kendala utama terletak pada akurasi dan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi dasar penyaluran. Kondisi ini menyebabkan adanya kelompok rentan yang belum terjangkau, sementara sebagian penerima yang lebih mampu tetap memperoleh bantuan. Temuan tersebut diperkuat oleh Nurofik & Kolopaking (2022) yang menyoroti kelemahan pendataan dan verifikasi DTKS sebagai penyebab ketidakmerataan distribusi bantuan.

- Responsivitas

Penyaluran BPNT di Kecamatan Kadungora menunjukkan responsivitas yang cukup baik, ditandai dengan ketersediaan jalur pengaduan melalui RT, desa, dan pendamping sosial. Proses pencairan berjalan lancar dan sesuai jadwal tanpa keterlambatan. Namun, kelemahan utama terletak pada aspek **sosialisasi**, yang meskipun diklaim rutin oleh pemerintah, di lapangan hanya dilakukan sesekali. Akibatnya, sebagian besar KPM lebih banyak memperoleh informasi melalui sesama penerima. Kondisi ini mengindikasikan bahwa strategi komunikasi publik belum optimal, sehingga pemahaman masyarakat terhadap program masih terbatas. Temuan ini sejalan dengan Suryany et al. (2017) yang menyebutkan bahwa kegiatan sosialisasi BPNT masih bersifat formalistik dan belum substantif.

- Ketepatan

Indikator ketepatan penyaluran BPNT masih menunjukkan perbedaan persepsi. Sebagian KPM menilai bantuan tunai lebih tepat karena fleksibel dan dapat digunakan sesuai kebutuhan mendesak, sementara sebagian lainnya lebih menyukai sembako karena lebih terarah pada pemenuhan pangan. Pihak TKSK juga menilai sembako lebih mudah dikontrol, sedangkan Bank Mandiri menganggap penyaluran tunai lebih praktis secara teknis. Dinas Sosial menegaskan bahwa bantuan hanya bersifat tambahan sehingga ketepatan pemanfaatannya bergantung pada kesadaran penerima.

Hambatan Pada Evaluasi Kebijakan

Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai di Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut

Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kadungora masih menemui berbagai kendala pada setiap indikator evaluasi. Dari sisi efektivitas dan ketepatan, penyaluran dalam bentuk tunai memang memberikan keleluasaan bagi KPM, namun penggunaannya sering tidak sejalan dengan tujuan program sehingga kurang mampu menjamin ketahanan pangan keluarga penerima. Pada aspek responsivitas, kegiatan sosialisasi dan pengawasan di lapangan belum berjalan konsisten, sehingga informasi mengenai mekanisme program lebih banyak diperoleh melalui komunikasi antarwarga. Dari perspektif pemerataan, bantuan belum menjangkau seluruh kelompok rentan, terutama lansia, akibat ketidakakuratan DTKS, sementara sebagian penerima justru berasal dari kalangan yang relatif lebih mampu.

Terkait kecukupan, mayoritas KPM menilai nominal Rp200.000 per bulan belum cukup untuk menutup kebutuhan dasar, terutama bagi keluarga besar, meskipun bantuan tetap dianggap meringankan beban hidup. Dalam hal efisiensi, mekanisme pencairan melalui ATM dinilai lebih sederhana dibanding e-warung, meskipun masih menghadapi kendala akses dan literasi keuangan. Sedangkan pada indikator ketepatan, masih terdapat perbedaan pandangan antara penerima manfaat, pendamping, dan pihak instansi terkait mengenai bentuk bantuan yang paling sesuai, apakah tunai atau sembako.

Secara umum, hambatan utama penyaluran BPNT di Kadungora mencakup penyimpangan penggunaan bantuan, lemahnya sosialisasi dan monitoring, belum akuratnya pendataan penerima, nilai bantuan yang dianggap minim, serta belum adanya kesepahaman terkait bentuk penyaluran. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan pada aspek sosialisasi, perbaikan DTKS, peningkatan mekanisme pengawasan, serta evaluasi ulang terhadap nominal dan bentuk bantuan agar tujuan program lebih tercapai.

Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Pada

Evaluasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai di Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut

Upaya perbaikan dalam penyaluran BPNT di Kecamatan Kadungora telah dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Dari aspek pendataan dan pemerataan, Dinas Sosial bersama pemerintah desa berusaha memperbarui DTKS secara bertahap, meskipun masih ditemui kesulitan di lapangan, seperti adanya warga layak yang belum terdata atau penerima yang kondisinya sudah lebih baik tetapi tetap mendapatkan bantuan. Pelibatan desa, kecamatan, hingga kabupaten diharapkan dapat memperkecil kesalahan data dan memastikan bantuan tepat sasaran.

Dari sisi responsivitas, pihak kecamatan mendorong pendamping sosial dan perangkat desa untuk lebih rutin melakukan sosialisasi dan monitoring. Upaya ini bertujuan agar KPM memahami penggunaan bantuan sesuai kebutuhan pokok, mekanisme pencairan, serta prosedur pengaduan bila terjadi kendala teknis. Selanjutnya, koordinasi lintas lembaga juga diperkuat melalui evaluasi rutin antara TKSK, pemerintah desa, Dinas Sosial, dan Bank Mandiri. Penyaluran tunai melalui rekening bank dan jaringan ATM dinilai lebih efisien, praktis, dan memudahkan akses penerima.

Namun, pada aspek ketepatan penggunaan bantuan, masih ada kekhawatiran bahwa bantuan tunai tidak selalu diprioritaskan untuk pangan. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat terus ditingkatkan agar dana bantuan digunakan sesuai tujuan program. Secara keseluruhan, strategi yang ditempuh mencakup pembaruan data, peningkatan sosialisasi, penguatan koordinasi, serta edukasi penerima manfaat. Meski demikian, tantangan teknis dan sosial di lapangan menunjukkan perlunya perbaikan berkelanjutan dan keterlibatan semua pihak agar penyaluran BPNT benar-benar optimal.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi kebijakan penyaluran BPNT di Kecamatan Kadungora menunjukkan bahwa indikator

efektivitas, efisiensi, dan responsivitas sudah berjalan optimal, sedangkan indikator kecukupan, pemerataan, dan ketepatan masih menghadapi kendala. Beberapa KPM menilai bantuan Rp200.000 per bulan belum mencukupi kebutuhan pokok, khususnya bagi keluarga besar, dan masih terdapat warga miskin yang belum menerima bantuan akibat ketidakakuratan DTKS, sementara sebagian penerima dianggap lebih mampu.

Selain itu, perdebatan mengenai bentuk bantuan masih berlangsung, di mana sebagian KPM lebih memilih bantuan tunai karena fleksibilitas, sementara lainnya dan TKSK menilai sembako lebih tepat sasaran. Hambatan lain yang ditemukan yaitu pemanfaatan bantuan yang tidak selalu sesuai kebutuhan pangan, keterbatasan sosialisasi dan monitoring, serta lemahnya pengawasan di lapangan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial telah melakukan sejumlah upaya strategis, seperti meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi, memperbaiki pendataan dengan melibatkan unsur desa hingga kabupaten, serta memperkuat koordinasi dengan TKSK, pendamping sosial, pemerintah desa, dan pihak perbankan agar penyaluran lebih efektif dan tepat sasaran.

Ke depan, disarankan agar pemerintah memperbarui DTKS secara berkala, meningkatkan sosialisasi terkait tujuan program dan mekanisme pengaduan, serta mengevaluasi kembali nominal bantuan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dasar rumah tangga. Dengan langkah-langkah tersebut, penyaluran BPNT diharapkan dapat berjalan lebih optimal, merata, dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima.

F. DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. (2015). *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan. Graha Ilmu. Yogyakarta.*

Anggraeni, R., & Zauhar, S. (2013). *Evaluasi Kebijakan Publik (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang).* In *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* (Vol. 1, Issue 1).

Agustina, D., & Megawati, S. (2022). *Evaluasi kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto.* *Publika*, 175-190.

Ailiyah, N., Chalimah, N., Fauzi, M. A. N., & Wahyudi, M. A. (2023). Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Kehidupan Perekonomian Masyarakat Desa Seboro Kabupaten Probolinggo. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12(3)

Aziz, M. L. A., & Wahyudi, K. E. (2023). *Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.* *Journal Publicuho*, 6(4), 1208-1219.
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.251>

Cetrayon, C., Suryany, E., & Skoldan, S. (2023). Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai Oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok. *Jurnal Public Administration, Business and Rural Develoment Planning*, 5(1), 1-30.

Dunn, William N. 2003. *Analisa Kebijakan Publik.* Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik(2nd ed.).* Gadjah Mada University.

Kristian, I., Rahma, A. F., Nugraha, B., & Putri, C. A. (2020). Transparansi dan akuntabilitas dalam perspektif kinerja pemerintah daerah. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 18(3), 11-22.

- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurofik, I., & Kolopaking, L. M. (2022). *Efektivitas Program Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT dan PKH) di Kota Mojokerto*. *Jurnal Manajemen Ekonomi dan Sosial*, 3(2), 101–112.
- Sudrajat, Y., & Kristian, I. (2022). Implementasi Aplikasi E-Retribusi di Pasar Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(2), 116-127.
- Subagyo, A., & Kristian, I. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif*. Aksara Global Akademia.
- Suryany, A., Rosfiantika, E., & Nurwati, N. (2017). *Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial*. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 16(1), 45–58.
- Subagyo, A., Ip, S., Kristian, I., Ip, S., & Kom, S. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Aksara Global Akademia.
- Undang, G., & Suhendar, D. (2023). Strategi Peningkatan Daya Saing Daerah Tertinggal: Analisis Potensi Ekonomi Wilayah Kabupaten Nias Barat. *MINISTRATE: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 215–236.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ministrate/article/view/34869>
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai
- Peraturan Pemerintah (PERMEN) Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Winarno, Budi, 2014. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presindo

